

JURNAL **POLICY** KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA TERHADAP
INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN
PERIODE 1945-1958**

M. Bagus Sekar Alam

**KEBIJAKAN PENERAPAN *NATIONAL SINGLE
WINDOW* MENUJU DAYA SAING PERDAGANGAN
INTERNASIONAL INDONESIA**

Sarjiyanto

**DILEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI ERA OTONOMI DAERAH
(Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau)**

Dian Pranowo

**POTENSI TENAGA KERJA INDONESIA PURNA
PENEMPATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN
EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN TKI PURNA
MANDIRI DI SUBOSUKOWONOSRATEN**

Izza Mafruhah

Siti Aisyah Tri Rahayu

Nurul Istiqomah

**DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA EKONOMI MAKRO : SUATU SIMULASI
MODEL *COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM***

Indra Maipita



POLICY

JURNAL

KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA TERHADAP
INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN
PERIODE 1945-1958**

M. Bagus Sekar Alam

**KEBIJAKAN PENERAPAN *NATIONAL SINGLE
WINDOW* MENUJU DAYA SAING PERDAGANGAN
INTERNASIONAL INDONESIA**

Sarjiyanto

**DILEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI ERA OTONOMI DAERAH
(Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau)**

Dian Pranowo

**POTENSI TENAGA KERJA INDONESIA PURNA
PENEMPATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN
EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN TKI PURNA
MANDIRI DI SUBOSUKOWONOSRATEN**

Izza Mafruhah

Siti Aisyah Tri Rahayu

Nurul Istiqomah

**DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA EKONOMI MAKRO : SUATU SIMULASI
MODEL *COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM***

Indra Maipita



Jurnal Policy

KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN

VOLUME 10 JANUARI – JUNI 2013

ISSN – 1979 0546

JURNAL POLICY menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan kebijakan daerah dan kelembagaan. Tulisan harus asli (bukan plagiat), hasil pemikiran, penelitian, atau opini yang disertai dengan penyebutan acuan/pustaka sebagaimana layaknya tulisan ilmiah. Tulisan tersebut juga belum pernah dipublikasikan pada penerbitan yang lain. Tulisan dapat dikirim melalui e-mail: ppkdk_uns@yahoo.com dengan menyertakan hardcopy yang dikirim melalui sekretariat redaksi Jurnal POLICY – Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) – Universitas Sebelas Maret – Surakarta. Jl. Ir. Sutami No 36A – Ketingan – Surakarta – 57126. Telp. (0271) 632916 Fax. (0271) 632368

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Tuhana, S.H., M.Si.

Dewan Redaksi

Asep Yudha Wirajaya, S.S., M.A.

Siti Khoiriyah, S.E., M.Si.

M. Bagus Sekar Alam, S.S., M.Si.

Mitra Bestari

Prof.Dr.Sunardi, M.Sc.

Prof Totok Sarsito, MS, PhD

Prof. Dr. Sarwiji, M.Pd

Prof.Dr.Nizam

Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc, Ph.D

Dr.Ir.Kusnandar, M.Si

Dr. Evi Grafitiani, SE., M.Si

Dr. Kundharu, SS., M.Hum

Pelaksana Tata Usaha

Dian Pranowo, S.H.

Harmanto YW, S.E.

DAFTAR ISI

VOLUME10 JANUARI-JULI 2013

- Kebijakan Luar Negeri Amerika Terhadap Indonesia Pada Masa Perang Dingin Periode 1945-1958
M. Bagus Sekar Alam 1
- Kebijakan Penerapan *National Single Window* Menuju Daya Saing Perdagangan Internasional Indonesia
Sariyanto 13
- Dilema Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Era Otonomi Daerah
Dian Pranowo 27
- Potensi Tenaga Kerja Indonesia Purna Penempatan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Melalui Pemberdayaan TKI Purna Mandiri di SUBOSUKOWONOSRATEN
Izza Mufruhah, Siti Aisyah TR, Nurul Istiqomah 55
- Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kinerja Ekonomi Makro: Suatu Simulasi Model *Computable General Equilibrium*
Indra Maipita 68

Kebijakan Penerapan *National Single Window* menuju Daya Saing Perdagangan Internasional Indonesia

Oleh

Sarjiyanto

masyanto@staff.uns.ac.id

(*Peer group* PPKDK Bidang Ekonomi dan Bisnis & Staff Pengajar Diploma III Manajemen Perdagangan Fakultas Ekonomi UNS)

Abstraksi

Paper ini mengulas mengenai penerapan kebijakan *National Single Window* (NSW) sebagai salah satu kebijakan dalam prosedur dan tata niaga praktik perdagangan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Organisasi perdagangan internasional, suka tidak suka harus mengikuti dan meratifikasi berbagai kesepakatan perdagangan internasional. Salah satu kesepakatan perdagangan internasional adalah penerapatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam proses lalulintas administrasi perdangan internasional. Paper ini mengulas bahwa dasar hukum pelaksanaan penerapan *National Single Window* (NSW) di Indonesia sudah disusun dan tahapannya sudah ditetapkan. Berdasarkan pentahapan yang ada tahun 2012 seluruh administrasi transaksi perdagangan internasional menerapkan kebijakan ini, dan program ini sudah harus terintegrasi secara regional di ASEAN. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada seluruh stekholder dunia perdagangan kita agar mempersiapkan diri dan memanfaatkan kebijakan ini untuk menuju daya saing perdangan internasional Indonesia.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup NSW (*National Single Window*) di dunia Perdaganga Indonesia

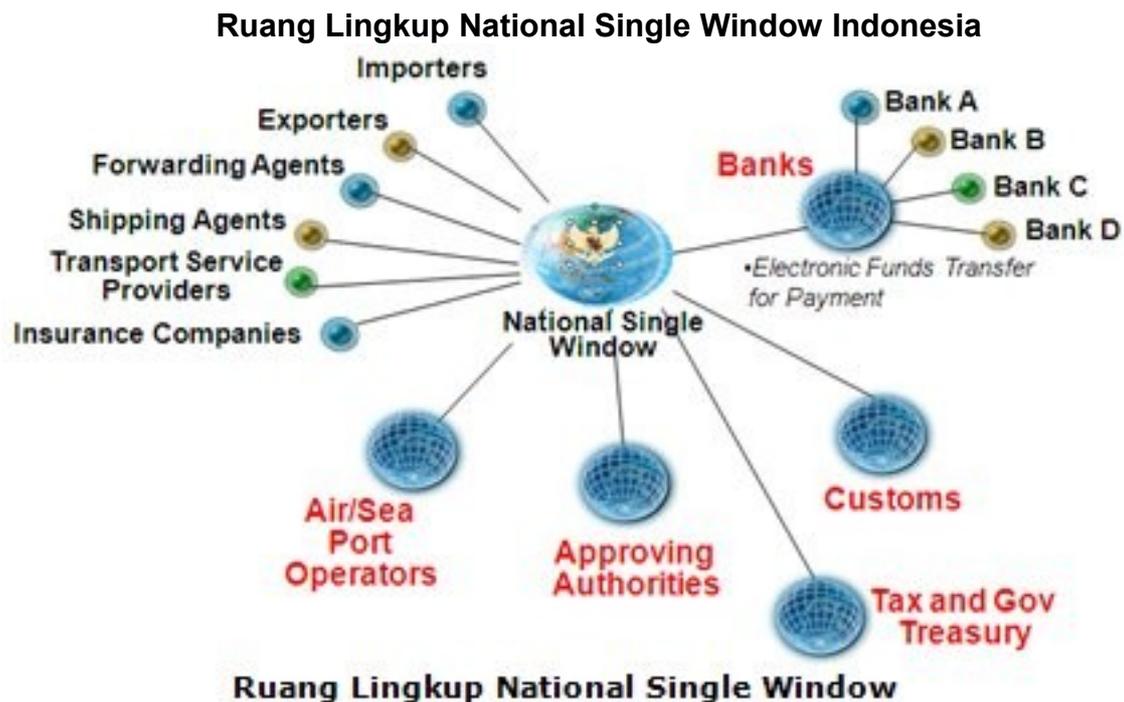
National Single Window atau yang sering disebut sebagai Indonesia *National Single Window* (INSW) merupakan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalulintas barang ekspor dan impor, untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. *National Single Window* (NSW) adalah satu jendela dalam bentuk ICT yang merupakan suatu sistem yang mampu melakukan pengajuan data dan informasi *single submission*, *single processing* data dan informasi, serta *single decision* untuk melakukan suatu *release* barang. Penerapan NSW dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan RI dengan pihak internasional atau kawasan regional ASEAN.

Selain itu juga karena kondisi kinerja pelayanan lalu-lintas barang ekspor-impor seperti *lead time (release-time)* atau waktu penanganan barang impor yang masih terlalu lama. Serta masih banyaknya *Point of Services* (Titik-titik Layanan) dalam kegiatan ekspor-impor mengakibatkan adanya biaya-biaya atau *high cost economy*. Di samping itu juga dilandasi karena kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang negara, terutama terkait dengan isu terorisme, *trans-national crime, drug trafficking, illegal activity, intellectual property right* dan perlindungan konsumen.

Penerapan Sistem NSW di Indonesia, dilakukan melalui penyediaan Portal INSW, yaitu suatu sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Dasar Hukum penerapan NSW di Indonesia mengacu pada;

1. Keppres No. 54 Tahun 2002 jo. Keppres No. 24 Tahun 2005 & No. 22 Tahun 2007 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
2. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 & Inpres No. 6 Tahun 2007 à Iklim Investasi; serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 à Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 : Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka INSW
4. Keputusan Menko Perekonomian No. 22/M.Ekon/03/2006 terakhir diubah dgn KEP-19/M.EKON/04 /2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW.

Gambar 1.



Sumber: Sosialisasi NSW Tahun I, 2009

Pada tataran ideal dalam penerapan Sistem NSW, diharapkan Portal INSW akan menjadi 'akses tunggal' bagi siapapun (seluruh entitas) yang akan melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan penanganan dan pelayanan ekspor-impor. Demikian juga bagi User (Pengguna Portal INSW), cukup sekali saja melakukan akses (*single sign on*) akan dapat memperoleh semua layanan dari semua GA (*general Agency*) dan entitas lainnya yang tergabung kedalam Portal INSW.

Penggunaan Portal INSW secara 'live' dalam proses pelayanan kepabeanan dan perijinan atas barang impor dan ekspor, akan membawa Indonesia menuju otomasi secara elektronik sistem pelayanan publik yang terintegrasi, sehingga diharapkan secara konkrit akan dapat mewujudkan "Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor".

B.Strategi Penerapan dan Manfaat Penerapan NSW bagi Indonesia

Visi dari pengembangan Indonesia NSW adalah terwujudnya lingkungan "National Single Window" di Indonesia, yaitu layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran

arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional

Misi dari Pengembangan Sistem NSW di Indonesia
Misi pengembangan sistem NSW di Indonesia adalah mewujudkan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi dalam penanganan atas lalulintas barang ekspor dan impor
Strategi Pengembangan Sistem NSW di Indonesia
Strategi yang akan dilaksanakan dalam pengembangan Sistem NSW di Indonesia antara lain :

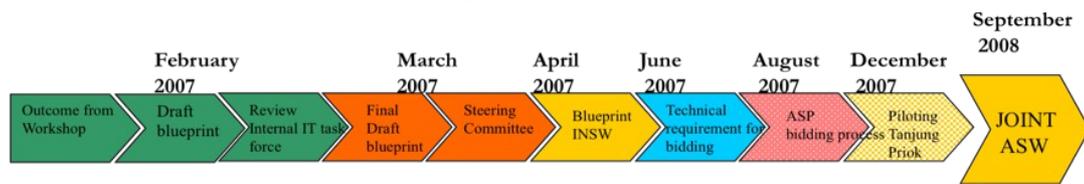
1. Melakukan kolaborasi sistem dari seluruh entitas (Instansi Pemerintah, Institusi lainnya dan Swasta) sebagai upaya percepatan penyelesaian proses ekspor-impor.
2. Komitmen bersama untuk melakukan koordinasi dalam memadukan dan menyelaraskan proses bisnis antar entitas, guna meningkatkan kinerja dan efektifitas layanan yang terkait dengan ekspor-impor.
3. Menyempurnakan dan melengkapi perangkat hukum serta kelengkapan persyaratan legal lainnya, guna mendukung terwujudnya visi Indonesia NSW.
4. Meningkatkan kapasitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip Good-Governance dalam pelayanan ekspor-impor

Strategi Penerapan Sistem NSW di Indonesia
Penerapan Sistem NSW di Indonesia dilakukan secara bertahap, sesuai dengan strategi pentahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW, tentang Pedoman Dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan Dan Penerapan Indonesia National Single Window (INSW), dengan pokok-pokok tahapan:

1. Ujicoba Tahap Awal Sistem NSW di Indonesia
2. Implementasi Tahap Kesatu Sistem NSW
3. Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW
4. Implementasi Tahap Ketiga Sistem NSW
5. Implementasi Tahap Nasional Sistem NSW
6. Joint to ASEAN Single Window

Gambar.2.

Renaca Implementasi NSW sejak Tim NSW di bentuk tahun 2007



Sumber: Presentasi Tim Persiapan NSW. 2007

Tujuan Umum Penerapan Sistem NSW Tujuan umum dilakukannya penerapan Sistem National Single Window di Indonesia :

1. Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang ter-integrasi antar seluruh entitas yang terkait.
2. Meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses *customs release and clearance of cargoes*.
3. Meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi

Manfaat Penerapan Sistem NSW bagi Pemerintah

1. Memfasilitasi peningkatan kecepatan dalam proses *customs release and clearance of cargoes*
2. Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman, dan memberikan kepastian usaha
3. Menciptakan manajemen risiko yang lebih baik
4. Menghilangkan redundansi dan duplikasi data
5. Meningkatkan validitas dan akurasi data
6. Memudahkan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah dalam kaitan dengan kegiatan ekspor-impor
7. Meningkatkan perlindungan atas kepentingan nasional dari ancaman yang mungkin timbul karena lalulintas barang ekspor-impor
8. Mengoptimalkan penerimaan negara
9. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Public Governance* dalam seluruh kegiatan pelayanan ekspor-impor

Manfaat Penerapan Sistem NSW bagi Masyarakat Usaha (*Private Sector*):

1. Memberikan kepastian terhadap biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan yang terkait dengan ekspor-impor
2. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri
3. Memperluas akses pasar dan sumber-sumber faktor produksi
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
5. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan
6. Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penyelesaian ekspor-impor

C. Komponen Utama Entitas Pendukung Penerapan Sistem NSW di Indonesia

Komponen utama entitas sistem yang akan mendukung penerapan sistem NSW di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4: **Instansi Pemerintah yang Terkait Langsung dengan Kegiatan Ekspor-Impor** (Related GA) Semua instansi pemerintah yang melakukan pelayanan kepada publik terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, mulai yang menerbitkan perijinan ekspor-impor (*licenses*), penyelesaian kewajiban kepabeanan (*customs-clearance*), yang menangani pelayanan fisik barang di pelabuhan (*cargo-handling*), dan layanan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pengawasan lalulintas barang ekspor-impor. Seluruh instansi pemerintah ini bertanggung jawab memasok layanan ke Portal sistem NSW sesuai dengan *Service Level* yang telah disepakati bersama

Pelaku Usaha di Bidang Ekspor-Impor. Para pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor akan menjadi pengguna sistem dalam layanan Portal NSW, mulai dari Importir, Eksportir, PPJK, Shipping/ Airline, Forwarder, Perusahaan Transportasi, Perusahaan Logistik, Warehousing, Perbankan dan sektor-sektor usaha lain yang ada keterkaitan dengan kegiatan penanganan lalulintas barang ekspor-impor. Pelaku usaha melakukan akses langsung terhadap layanan Portal

NSW dalam menyelesaikan berbagai kewajiban administratif dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor

Sistem NSW Negara-negara lainnya. Sistem NSW negara lain, terutama negara-negara anggota ASEAN, akan menjadi salah satu Entitas utama dalam operasional sistem NSW apabila sistem Indonesia NSW sudah dilakukan interkoneksi dengan NSW negara lain melalui sistem *ASEAN Single Window* maupun skema kerjasama bilateral lainnya Sistem NSW negara lain berperan dalam melakukan pertukaran data elektronik dengan Indonesia NSW.

Pihak Pengelola Sistem NSW. Pengelola Sistem yang handal merupakan kunci utama keberhasilan operasional Portal NSW, dimana dapat dilakukan oleh Institusi yang ditunjuk oleh pemerintah, atau diserahkan kepada Application Service Provider dengan berbagai skema kerjasama. Mengelola fungsi dan fasilitas sistem NSW, serta menjadi pengendali hubungan antar muka seluruh komponen yang terkait, dibawah kendali pemerintah melalui Tim Nasional atau institusi yang ditunjuk

Kesepakatan Dasar dalam Pengembangan Sistem NSW di Indonesia. Kewenangan setiap Entitas (GA) dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing Entitas sesuai dengan service-level yang disepakati. Perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing-masing Entitas (GA) dan diluar koordinasi Tim Persiapan NSW, namun harus selaras dan sejalan dengan kebijakan pengembangan Sistem NSW. Tim Persiapan NSW akan menyiapkan aplikasi antar-muka (*interface*) antar Entitas dalam otomasi alur proses (*automated workflow*) Sistem NSW, melalui Portal NSW. Entitas yang belum memiliki system, akan disediakan fasilitas entry sesuai standar dan kebutuhan Sistem NSW. Guna penerapan sistem NSW, dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan dan prosedur yang tidak sejalan. Penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan Sistem NSW didasarkan pada jadwal integrasi dengan Sistem ASW; Tim Persiapan NSW atau badan yang akan ditunjuk, bertanggung jawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian Sistem dan Portal NSW.

Gambar.4.
Tampilan Layar Intrade sebagai Trade System

The screenshot displays the INATRADE web interface. At the top, there is a header with the INATRADE logo and a user login status: "Ditfas - Eko login as Public User". A "Log Out" button is visible in the top right corner. Below the header, there is a "Main Menu" section with a tree view of navigation options. The "PE - Persetujuan Ekspor" option is highlighted. To the right of the menu is a "Ditfas's Profile" section with a user icon and a list of personal details. Below the profile is a "Create Document By Wizard" section with several document type links. At the bottom, there is a table showing a list of documents.

INATRADE

:: Ditfas - Eko login as Public User ::

Log Out

[Main Menu]

open all | close all

Home

- Pendaftaran
- Rekomendasi
- Pengakuan
 - ETPIK
 - IP - Importir Produsen
 - IT - Importir Terdaftar
 - uiuiuiuu
- Persetujuan
 - PE - Persetujuan Ekspor
 - PI - Persetujuan Impor
- NPIK
 - NPIK - Beras
 - NPIK - Elektronika
 - NPIK - Gula
 - NPIK - Jagung
 - NPIK - Kedelai
 - NPIK - Mainan
 - NPIK - Sepatu
 - NPIK - TPT

Ditfas's Profile

NPWP 111111111111

Nama Ditfas

Alamat Jl. M.J. Ridwan Rais

Telp 021-3858171

Nama Pelapor Eko

Alamat Pelapor Jl. M.J. Ridwan Rais

Telp Pelapor 12345678

KTP Pelapor 1234.123456.123456.

Create Document By Wizard

- Registrasi Umum
- Cakram Optik
- Polycarbonate
- Mesin & Peralatan Mesin
- Skrap Ferro, Ingot, Hasil Peleburan Skrap Besi
- Tekstil Produk Tekstil (TPT)
- NPIK
- API
- ETPIK

No	Layanan	Nama Dokumen	Status	Total
1	Registrasi Umum	ETPIK	NEW	1
2	Registrasi Umum	NPWP	COMPLETED	1

2. Port System ("PortNet"): ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalulintas fisik barang ekspor-impor (Flow of Goods) Cargo Release, yang melakukan pertukaran data:
 - a. Dari Customs-System: Cargo Manifest (Inward dan Outward) dan Release Approval (SPPB/PE)
 - b. Dari Port-System (GA): Discharge List / Loading List dan Gate in / Gate out List

Gambar.5.
Tampilan Layar Portal NWS Indonesia



Kebijakan Umum dalam Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW di Indonesia. Untuk memudahkan pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia dan mendasarkan pada skala prioritas yang mempertimbangkan urgensi sistem dan keterbatasan sumber daya, secara umum Sistem NSW dikelompokkan kedalam 4 kelompok sistem:

1. Sistem NSW-Impor :Sistem pada Portal INSW yang akan menangani proses pelayanan impor, yang akan mengintegrasikan data dan informasi dari Bea dan Cukai dengan GA Penerbit Perijinan impor,
2. Sistem NSW-Ekspor :Sistem pada Portal INSW yang akan menangani proses pelayanan impor, yang akan mengintegrasikan data dan informasi dari Bea dan Cukai dengan GA Penerbit Perijinan ekspor,
3. Sistem NSW-SeaPort (Kepelabuhanan):Sistem pada Portal INSW yang akan menangani proses pelayanan barang dan sarana pengangkut di pelabuhan laut, yang akan mengintegrasikan data dan informasi dari Bea dan Cukai dengan semua GA yang ada di komunitas Pelabuhan Laut,
4. Sistem NSW-AirPort (Kebandarudaraan):Sistem pada Portal INSW yang akan menangani proses pelayanan barang dan sarana pengangkut di bandar udara,

yang akan mengintegrasikan data dan informasi dari Bea dan Cukai dengan semua GA yang ada di komunitas Bandar Udara.

Portal INSW sebagai suatu fasilitas yang dipersiapkan sebagai wadah akses tunggal yang menyediakan semua fasilitas dan fungsi dari semua layanan yang terkait dengan ekspor-impor, minimal harus menyediakan semua fasilitas dan fungsi pokok untuk dapat membantu melakukan operasional kegiatan layanan ekspor-impor. beberapa fitur dan fasilitas yang disediakan di halaman awal (homepage), memang disiapkan untuk menjalankan fungsi informasi yang dapat diakses oleh publik, sehingga diharapkan semua informasi umum yang terkait dengan operasional layanan sistem NSW dapat diakses di homepage ini. Sedangkan untuk Portal INSW, yang menjalankan fungsi operasional transaksi layanan dan hanya bisa di-akses oleh User yang sudah ter-otorisasi, menyediakan beberapa fitur layanan informasi yang spesifik yang terkait dengan transaksi kegiatan ekspor-impor, antara lain:

Tracking Dokumen: Fasilitas untuk melihat secara rinci status dari semua proses dan tahapan dalam pelayanan per transaksi dokumen PIB, dapat melihat rincian detail waktu dan proses pelayanan (jam : menit : detik), dapat mengecek semua output proses pelayanan, dan dapat juga melihat dan mencetak semua respon elektronik sebagai hasil akhir dari proses pelayanan ekspor-impor. Dengan fasilitas ini diharapkan ada transparansi dan kepastian, dimana setiap detail proses layanan di GA dapat dilihat dan dikontrol oleh pengguna jasa / pelaku usaha (Importir/ Eksportir), sehingga akan ada kejelasan dan kepastian pelayanan.

View Dokumen Perijinan : Fasilitas untuk melihat semua perijinan dari seluruh GA yang ada di Portal, dengan menyediakan parameter per GA penerbit ijin, per User penerima ijin, per tanggal dan jenis perijinan, sehingga semua output perijinan dari seluruh GA secara transparan akan terkontrol di Portal INSW.

View Manifes : Menyediakan fasilitas untuk langsung koneksi kedalam sistem SAP PDE Manifes di DJBC, sehingga semua informasi manifes (header dan detail) yang diterima oleh KPU DJBC, dapat dilihat oleh siapapun sesuai dengan hirarki otorisasi dan kewenangannya.

Laporan Realisasi Perijinan (Utilization Report): Laporan ini sangat dibutuhkan oleh semua GA penerbit perijinan untuk mengontrol penggunaan ijin yang telah diterbitkan dan sebagai alat untuk rekonsiliasi antara ijin yang diterbitkan dengan realisasi impornya.

View proses Analyzing Point: Untuk melihat secara rinci terhadap proses penelitian perijinan dan status hasil penelitian perijinan secara rinci, termasuk rincian detail waktu proses penelitian perijinan (jam : menit : detik) sebagai kontrol terhadap proses otomasi penelitian Lartas oleh Portal INSW.

D. Komponen, Standardisasi dan Prasyarat Teknis Sistem NSW

Komponen Teknis Sistem NSW utama yang menjadi kebutuhan mendasar dan menjadi prasyarat minimal untuk membangun dan mengembangkan sebuah Sistem NSW, antara lain: **Pertama** Gateway-Portal à berupa *common-portal nasional* yang berfungsi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen yang diperlukan dalam proses *customs clearance and release cargo* (Portal INSW), **kedua** *Interface* (aplikas antar muka) yang berupa suatu program intermediary-application yang diperlukan untuk mendukung inter-koneksi dan inter-operabilitas antar sistem para Pengguna Sistem NSW (instansi pemerintah maupun para pelaku usaha) yang terkait dalam Sistem NSW. **Ketiga** Sistem pelayanan (*inhouse system*) yang merupakan suatu sistem yang berada di internal masing-masing Instansi Pemerintah (GA), yang akan menyediakan semua layanan yang dibutuhkan oleh Portal INSW.

Gambar. 6.
Portal Indonesia Single Window

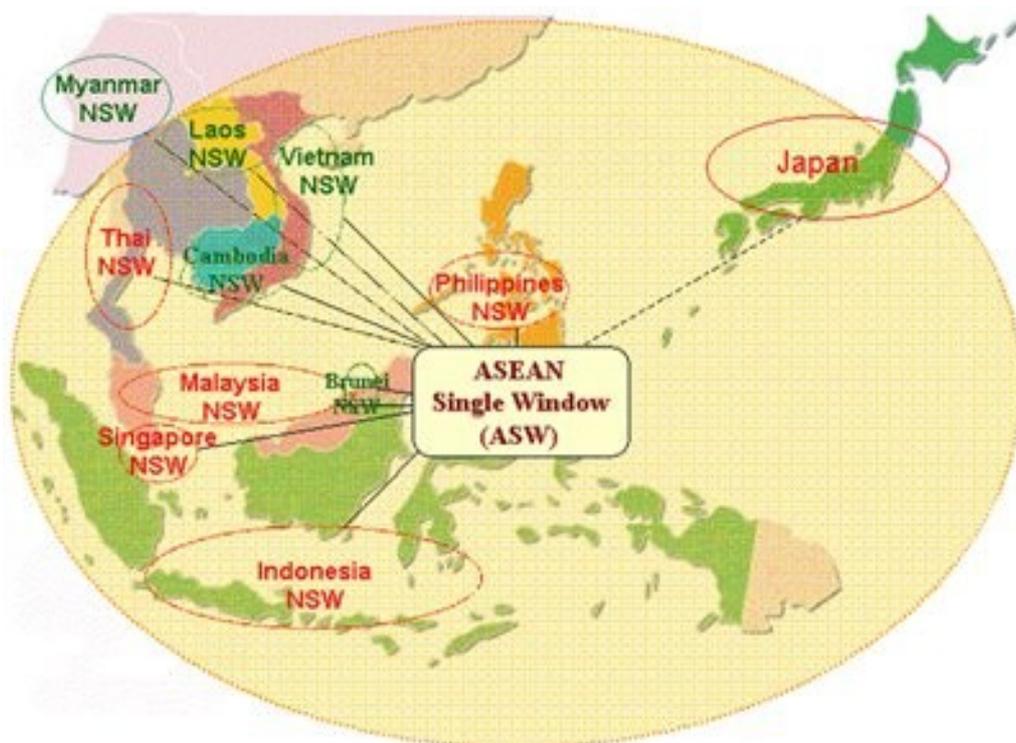


Standarisasi Elemen Data telah disepakati oleh seluruh anggota Tim Persiapan NSW bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW di Indonesia, Portal INSW beserta semua sistem yang terkait dengan Portal NSW (*inhouse-system* di semua GA dan Modul Aplikasi yang ada di User), akan menggunakan acuan dan referensi standar internasional: “*World Customs Organization (WCO) Data Model* versi yang terakhir, disertai dengan rujukan lainnya sesuai dengan *international standard & best practises* yang lain, seperti *ASEAN Data Set, UNeDocs, UNTDED dan UN-EDIFACT*” Prasyarat Teknis Selain aspek teknis yang dibutuhkan dalam pembangunan dan penerapan Sistem NSW, untuk dapat melakukan penerapan Sistem NSW sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, paling tidak diperlukan beberapa kondisi dan prasyarat teknis:

1. Ketersediaan jaringan (*Network Availability*), sistem cadangan (*Redundancy System*) dan sistem penanggulangan bencana (*Disaster Recovery System*)
2. Ketersediaan perangkat pengaman jaringan (*Network Security*)
3. Jaminan atas kehandalan jaringan (*Network Reliability*).

Conceptual Model untuk penerapan Sistem NSW di Indonesia mengacu pada model konseptual penggabungan sistem NSW kedalam sistem *ASEAN Single Window* (ASW) sebagaimana ditetapkan dalam *ASW Technical Guide*. Dalam pelaksanaannya, jadwal penggabungan ke sistem ASW dibahas dan dirumuskan bersama dalam *forum ASW Steering Committee*, yang terdiri dari *Technical Working Group* dan *Legal and Regulatory Working Group*.

Gambar. 7. Skema ASEAN Single Window sebagai Target National Single Window Negara-Negara ASEAN Tahun 2012

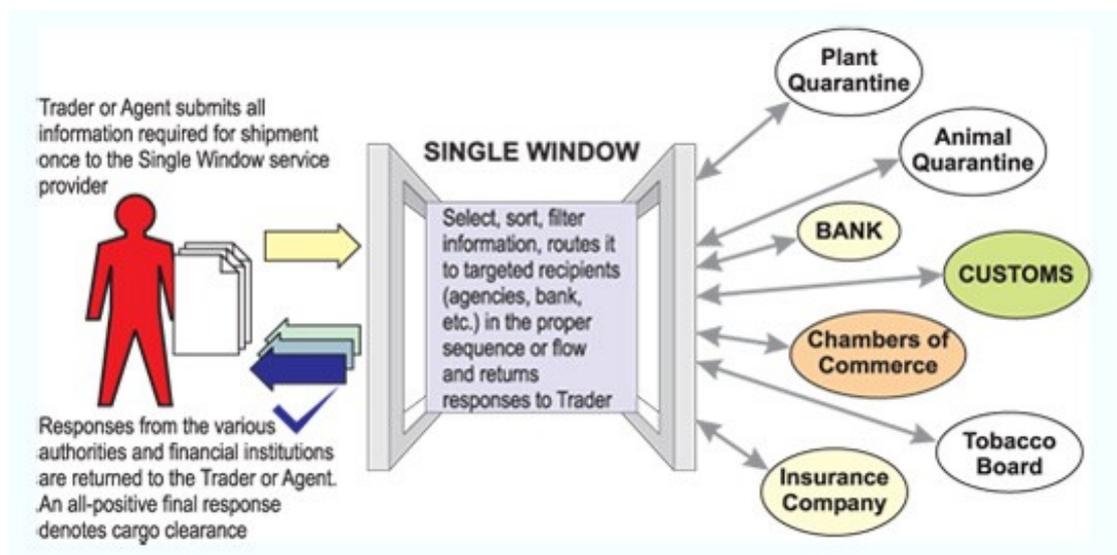


Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Sistem NSW di masing-masing negara ASEAN dan penggabungannya kedalam Sistem ASW, dan sesuai

dengan matriks kegiatan dari “*Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*”, dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Untuk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand) harus sudah mengoperasikan Sistem NSW dan mulai bergabung dengan Sistem ASW pada tahun 2009.
2. Untuk ASEAN-4 (Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) harus sudah mengoperasikan Sistem NSW dan mulai bergabung dengan Sistem ASW paling lambat pada akhir tahun 2012

Gambar.8.
Tipologi dan Arsitektur NSW dengan Konsep *single-integrated portal*



Topologi dan arsitektur sistem NSW yang dibangun, dikembangkan dan telah diterapkan di Indonesia menggunakan konsep *single-integrated portal* dengan membangun suatu *common-portal* nasional berupa Portal INSW. Pada tataran ideal, penerapan sistem NSW melalui Portal INSW akan menggunakan konsep *Single Sign-On* (SSO) sehingga seluruh pihak yang terkait dengan semua urusan yang berkaitan dengan masalah ekspor-impor, hanya perlu 1 (satu) kali akses, cukup dengan mengakses Portal INSW akan mendapatkan semua layanan dari seluruh GA dan entitas lain yang terkoneksi kedalam Portal INSW.

Gambar.9.
Komponen NSW Pada Rencana Implementasi tahun 2007 menuju Asean Single Window Tahun 2008



Sumber: Presentasi Tim NSW, Jakarta. 2007

E. Kesimpulan dan Saran untuk Keberhasilan Penerapan NSW menuju ASW

Pembangunan dan pengembangan Sistem NSW yang sedemikian besar dan sangat kompleks, memerlukan banyak sekali perubahan mendasar dan penyesuaian di lingkungan internal setiap GA, dimana dalam prakteknya sering menemui banyak permasalahan, kendala dan hambatan sehingga perlu langkah antisipasi dan solusi bersama. Untuk dapat melakukan penerapan Sistem NSW ini, terutama sekali di GA yang baru bergabung kedalam Portal INSW, harus dilakukan *“Change-Management”* dari semua aspek yang terkait dengan system layanan publik, sehingga mengakibatkan begitu besarnya potensi permasalahan dan

kendala. Permasalahan, kendala dan hambatan dalam proses Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW di Indonesia.

Ada beberapa faktor kunci (*key-factors*) yang secara dominan mempengaruhi penerapan Sistem NSW di Indonesia, agar penerapan tersebut sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan dan sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan dan manfaat dari penerapan Sistem NSW di Indonesia:

Komitmen Nasional, Komitmen nasional (terutama dari pihak pemerintah) sangat diperlukan dalam penerapan Sistem NSW, mengingat sistem ini sangat kompleks dan melibatkan banyak institusi dan mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan. Strong Lead-Agency. Kompleksitas dan besarnya skala pengembangan sistem yang memerlukan keterlibatan banyak entitas, mengharuskan adanya instansi pemerintah yang kuat dan dominan yang menjadi penggerak untuk keberhasilan penerapan sistem NSW.

Kesiapan Entitas yang terkait Sistem elektronik yang diotomasikan secara terintegrasi memerlukan kesiapan yang cukup dari semua Entitas karena akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan penerapan sistem NSW. Intensitas Sosialisasi. Sosialisasi harus dilakukandari awal secara sistematis, sehingga semua pihak memperoleh kesempatan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap potensi perubahanPenetapan Pengelola Portal NSW. Pengelola Portal NSW memegang peranan yang sangat strategis terhadap keberhasilan penerapan sistem NSW dalam jangka panjang, oleh karena itu penunjukan pengelola harus dilakukan dengan cermat. Aspek Legal yang Dibutuhkan. Penerapan sistem NSW memerlukan dukungan aspek legal sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Ketiadaan dasar hukum yang jelas akan menyulitkan dalam pembangunan dan penerapan sistem NSW.

Model Pembiayaan. Keputusan dalam penetapan model pembiayaan (financial model) untuk pembangunan dan pengoperasian sistem NSW harus ditetapkan se-awal mungkin sehingga pelaku usaha dapat mengantisipasi dari awal. Dukungan Stakeholders Penerapan sistem NSW yang melibatkan banyak entitas yang terkait, sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari

seluruh stakeholder, terutama terkait dengan karakteristik sistem NSW yang merupakan proses integrasi dan kolaborasi sistem dari semua entitas Instansi Pemerintah (*Government Agencies / GA*) yang telah bergabung kedalam Portal INSW.

F. Referensi Bacaan

Hermin Sembiring. Nasional Single Window dan ASEAN Single Window. Presentasi Tim Persiapan NSW. Jakarta. 8 Maret 2007

<http://insw.bea.cukai.go.id> Paparan Tim Persiapan National Single Window. Information Technology Task Force. 2007

<http://www.nsw.or.id> Ujicoba Awal Sistem NSW di Indonesia & Soft-Launching Official Website Indonesia NSW. Tanggal 19 Nopember 2007

<http://www.insw.go.id> Implementasi Tahap Kesatu Sistem NSW & Launching Official Website Indonesia NSW. Tanggal 17 Desember 2007

Jimmy AB Nikijuluw. Seminar Sosialisasi National Single Window dan ASEAN Single Window. Jakarta. 8 Maret 2007

Kompas - Bisnis&Keuangan, Surat Keterangan Asal Palsu Dicegah dan *Perbedaan Tarif Bea Masuk Rawan Dimanipulas*. 2 Agustus 2009

Keppres No. 54 Tahun 2002 jo. Keppres No. 24 Tahun 2005 & No. 22 Tahun 2007 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

Keputusan Menko Perekonomian No. 22/M.Ekon/03/2006 terakhir diubah dgn KEP-19/M.EKON/04 /2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008: Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka INSW